

PENILAIAN KINERJA PENYULUH DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BARITO TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH

The Performance of Forestry Extension Workers in Barito Tengah Forest Management Unit (KPH), Regency Barito Utara, Central Kalimantan

Rika Septiari, Asyisyifa, dan Arfa Agustina Rezekiah

Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *The Central Barito forest management unit (FMU) is located in North Barito Regency, Central Kalimantan, and its working area covers 7 (seven) sub-districts. The Central Barito FMU has experienced a decline in its carrying capacity either due to natural forces or human intervention. This requires the role of forestry extension workers to empower the community, therefore this research was conducted to analyze the performance of forestry extension officers. Data collection in this study was carried out by direct interviews with respondents. The results of interview data with forestry extension officers at KPH Barito Tengah, North Barito Regency, Central Kalimantan Province were analyzed according to the criteria for assessing forestry extension officers, Minister of Forestry Regulation Number P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016 concerning General Guidelines for the Implementation and Appreciation of Sustainable Ecosystems. Based on the assessment of the 7 criteria or indicators for assessing forestry extension agents, the average value of the performance of forestry extension officers at KPH Barito Tengah is in the good category with a score of 77.99.*

Keywords: *Extension Performance; Forestry Extension; Central Barito FMU*

ABSTRAK. Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Barito Tengah berada di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. KPH Barito Tengah berada di wilayah kerja 7 (tujuh) kecamatan. KPH Unit Barito Tengah telah mengalami penurunan daya dukungnya baik disebabkan oleh sumber alam itu sendiri ataupun karena adanya campur tangan manusia dari hal tersebut sangat diperlukan peran penyuluh kehutanan untuk memberdayakan masyarakat, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja penyuluh kehutanan. Metode pengambilan data pada penelitian ini dengan cara metode wawancara langsung kepada responden. Hasil data wawancara terhadap penyuluh kehutanan di KPH Barito Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dianalisis sesuai kriteria Penilaian penyuluh kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Untuk Penyelenggaraan dan Apresiasi Wana Lestari. Berdasarkan penilaian dari 7 kriteria atau indikator penilaian penyuluh kehutanan nilai rata-rata kinerja penyuluh kehutanan di KPH Barito Tengah termasuk dalam kategori bagus dengan skor sebesar 77,99.

Kata kunci: Kinerja penyuluh; Penyuluh kehutanan; Kesatuan pengelolaan hutan

Penulis untuk korespondensi, surel: septiaririka@gmail.com

PENDAHULUAN

Upaya dalam pembentukan merubah pola pikir masyarakat, karena penyuluh tidak hanya berperan ikut serta untuk prakondisi masyarakat agar mau, tahu dan mampu ikut serta berperan dalam kegiatan membangun kehutanan merupakan fungsi dan peran penyuluhan kehutanan yang sangat strategis, tetapi penyuluh kehutanan juga harus terus aktif dalam melakukan proses mendampingi masyarakat sehingga muncul kemandiriannya dalam pada usaha membangun kegiatan

yang berbasis kehutanan (Pandoyo, 2020). Penyuluhan kehutanan merupakan sebuah tempat di masyarakat yang mampu dan mau supaya terus belajar agar bisa mengorganisasikan kondisi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia itu sendiri selalu senantiasa dapat dikembangkan (Azami, 2018).

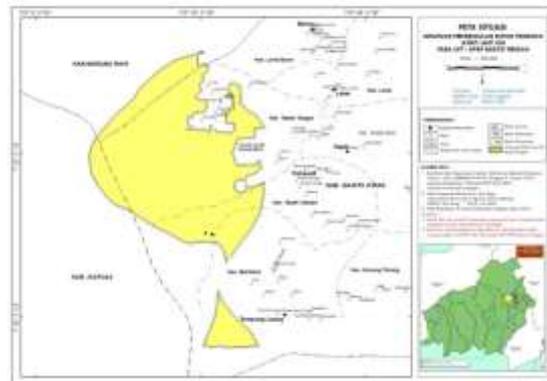
khususnya penyuluh kehutanan kesuksesan penyuluhan dalam membentuk pembangunan kehutanan harus ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia (SDM).

Penyuluh menjadi ujung pada tombak dalam pembangunan dibidang kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan pasti selalu ditingkatkan. Undang-undang No. 16 tahun 2006 berbunyi tentang penyuluhan yang dilaksanakan oleh PNS, penyuluh swasta atau penyuluh swadaya masyarakat. Disebutkan pula bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan untuk penyuluh. Menurut (Hamdani, 2017) jumlah penyuluh kehutanan, penghargaan profesi dan pengembangan karier adalah itu faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja penyuluh kehutanan.

KPH Barito Tengah berada di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, KPH Barito Tengah berada di wilayah kerja 7 (tujuh) kecamatan yaitu kecamatan Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan, Teweh Timur, Montallat, Gunung Purei, dan Gunung Timang. Penetapan wilayah Kesatuan Hutan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 717/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan luas wilayah ±177.404 ha. KPH Barito Tengah mempunyai 14 binaan kelompok tani dan 5 perhutanan sosial (KPHP BARITO TENGAH UNIT VI, 2020).

Aspek ekologi wilayah tertentu KPH Unit Barito Tengah telah mengalami penurunan daya dukungnya baik disebabkan oleh daya-daya alam itu sendiri ataupun karena adanya campur tangan manusia Diperlukan peran penyuluh untuk memberdayakan masyarakat, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja penyuluh kehutanan supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung serta sadar akan pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan masyarakat. Program penyuluhan dan mendampingi masyarakat untuk pengelolaan kawasan konservasi, merupakan sebuah langkah yang strategis dalam mengubah keterbelakangan pola pikir masyarakat dalam aspek konservasi (Diarsi & Idha, 2017).

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di KPH Barito Tengah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Waktu pelaksanaan penelitian ini kurang lebih 3 bulan meliputi kegiatan mulai dari kegiatan persiapan, lalu pengambilan data, selanjutnya pengolahan data dan kemudian penyusunan laporan hasil penelitian. Peralatan yang digunakan adalah alat tulis, kamera, serta laptop. Bahan yang digunakan adalah kuesioner. Objek Pada Penelitian ini adalah penyuluh kehutanan aktif di KPH Barito Tengah dan sebagai informasi tambahan kepala KPH Barito Tengah, Kepala Sub bagian Tata Usaha KPH Barito Tengah, dan anggota kelompok binaan kedua responden.

Penelitian ini meliputi pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada responden, data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Responden pada penelitian ini adalah penyuluh kehutanan aktif KPH Barito Tengah, Kepala KPH Barito Tengah, Kepala Sub bagian Tata Usaha KPH Barito Tengah dan 4 orang anggota Kelompok Tani Hutan (KTH). Hasil data wawancara terhadap responden di KPH Barito Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dianalisis sesuai kriteria penilaian atau indikator Penyuluh Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan dan Apresiasi Wana Lestari. Kriteria penilaian kinerja penyuluh kehutanan PNS berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016 diklasifikasikan menjadi 7 indikator dengan skor yang telah ditentukan.

Hasil data berupa skor yang diperoleh dari wawancara langsung selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh nilai kinerja penyuluh kehutanan

di KPH Barito Tengah Kabupaten Barito Utara. Perhitungan kinerja dapat dilihat pada Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian Kinerja Penyuluh Kehutanan

Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian Kinerja Penyuluh Kehutanan

No.	Indikator	Maksimal skor	Jumlah skor	Bobot (%)	Nilai
I	Administrasi kepegawain	9		5	
li	Kondisi wilayah kerja/bidang	12		10	
lii	Perencanaan	12		10	
lv	Kegiatan penyuluhan	21		30	
V	Hasil dan dampak kegiatan	21		30	
Vi	Pemantauan evaluasi dan pelaporan	9		5	
Vii	Kegiatan pengembangan	12		10	
Total nilai :				100	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (2016)

Rumus yang digunakan untuk menghitung pada nilai sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Maksimal Skor}} \times \text{Bobot (\%)} =$$

Hasil perhitungan nilai di kategorikan kembali dalam tingkat kinerja penyuluh kehutanan yang terbagi menjadi 4 kategori seperti pada Tabel 2 pada dibawah ini :

Tabel 2. Kategori Tingkat Kinerja Penyuluh Kehutanan

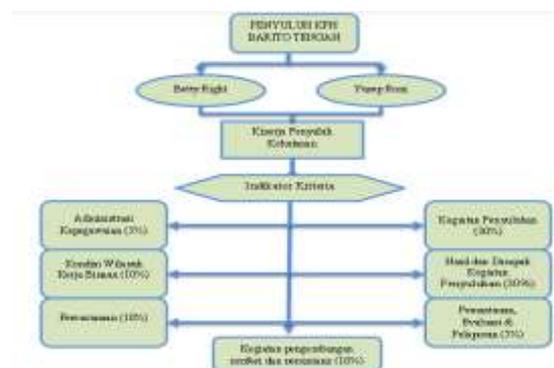
No.	Tingkat Kinerja	Interval Nilai
1	Sangat Bagus	>80 – 100
2	Bagus	>60 – 80
3	Cukup	>40 – 60
4	Kurang	>0 -40

Sumber : Fauzi (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Barito Tengah Kabupaten Barito Tengah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 2 (dua) orang tenaga penyuluh kehutanan PNS aktif yang dijadikan responden 1 atas nama Betty Right, S.Hut yang berusia 46 tahun dan responden 2 atas nama Yusep Roni, Amd yang berusia 45 tahun, kedua responden merupakan warga

asli Muara Teweh . Wilayah binaan penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah ada 7 kecamatan yaitu kecamatan Montallat, Gunung Timang, Teweh Selatan, Gunung Purei, Teweh Baru, Teweh Timur, dan Teweh Tengah. Hasil kinerja penyuluh kehutanan terbagi menjadi 7 kriteria atau indikator yaitu : Administrasi Kepegawaian dengan bobot 5%, Kondisi Wilayah pada Kerja/Bidang dengan bobot 10%, Perencanaan dengan bobot 10%, Kegiatan Penyuluhan dengan bobot 30%, Dampak dari Hasil Kegiatan Penyuluhan dengan bobot 30 %, Pelaporan, Pemantauan serta Evaluasi dengan bobot 5%, dan Penunjang Profesi dan Kegiatan Pengembangan 10%. Data penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Bagan Kriteria Kinerja Penyuluh Kehutanan di KPH Barito Tengah

Khususnya penyuluh kehutanan kesuksesan penyuluh kehutan dalam membangun kehutanan harus ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Penyuluh berperan sebagai ujung tombak pembangunan kehutanan, kompetensi penyuluh kehutanan maka harus selalu ditingkatkan. Penilaian kinerja penyuluh

kehutanan KPH Barito Tengah dinilai berdasarkan 7 kriteria atau indikator penilaian penyuluh kehutanan peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016. Hasil data penelitian yang diperoleh dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel. 3 Rekapitulasi Hasil Kinerja Penyuluh Kehutanan KPH Barito Tengah.

No	Indikator	Responden	Maksimal Skor	Jumlah Skor	Bobot (%)	Nilai
1.	Administrasi Kepegawaian	1	9	8	5	4,4
		2	9	8	5	4,4
2.	Kondisi Wilayah Kerja /Binaan	1	12	10	10	8,3
		2	12	10	10	8,3
3.	Perencanaan	1	12	12	12	10
		2	12	12	12	10
4.	Kegiatan Penyuluhan	1	21	20	30	28,5
		2	21	18	30	25,7
5.	Hasil dan Dampak Kegiatan Penyuluhan	1	21	12	30	17,14
		2	21	12	30	17,14
6.	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	1	9	8	5	4,4
		2	9	8	5	4,4
7.	Kegiatan Pengembangan Profesi dan Penunjang	1	12	7	10	5,8
		2	12	9	10	7,5
Jumlah						155,98
Rata-rata nilai						77,99

Tabel diatas menunjukkan responden 1 dan responden 2 mendapatkan nilai yang sama pada lima kriteria dan mendapatkan nilai yang berbeda hanya pada kriteria kegiatan penyuluhan dan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang. Nilai kedua responden sama disebabkan karena adanya antar kerjasama yang kuat antar responden seperti penyusunan laporan dan berkas kepegawaian lainnya disusun secara bersama-sama dan saling membantu antar satu sama lainnya dikarenakan penyuluh di KPH Barito Tengah hanya ada 2 orang maka kedua responden saling membantu agar kinerja sebagai seorang penyuluh bisa maksimal mengingat wilayah binaan KPH Barito Tengah ada 7 kecamatan. Kerjasama ini juga dalam rangka mengoptimalkan fungsi penyuluh kehutanan dalam membina wilayah binaanya. Kegiatan penyuluhan kehutanan dijadikan inventasi dalam jangka panjang untuk keamanan dan untuk melestarikan baik itu

sumberdaya hutan sebagai aset negara maupun menjadikan masyarakat sekitar kawasan hutan sejahtera.

Kriteria penilaian pada kegiatan penyuluhan dan pengembangan profesi. Responden 1 dan responden 2 mendapatkan nilai yang berbeda hal ini disebabkan karena ada perbedaan pada poin metode penyuluhan yang digunakan responden 1 dan 2, responden 1 banyak menggunakan berbagai macam metode sedangkan responden 2 menggunakan metode diskusi dan anjongsana. Hal ini disebabkan karena menurut responden 2 metode anjongsana dan diskusi kelompok kepada masyarakat binaan lebih efektif baik dalam menyampaikan program atau menyerap aspirasi atau masukan dari masyarakat binaan. Kemudian pada pengembangan profesi berbeda karena responden 1 belum mendapatkan prestasi.

Rekapitulasi hasil kinerja penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah yang menunjukkan bahwa indikator kegiatan penyuluhan menjadi indikator dengan nilai tertinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan di KPH Barito Tengah sudah bagus. Sedangkan nilai yang belum terpenuhi yaitu hasil dan dampak kegiatan penyuluhan KPH Barito disebabkan karena padatnnya jadwal kegiatan penyuluh

kehutanan dan banyaknya wilayah binaan penyuluh dengan jarak tempuh yang jauh sehingga hasil dan dampak kegiatan penyuluhan belum maksimal. Hasil penilaian tingkat kinerja masing-masing responden atau penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil Penilaian Kinerja Penyuluhan Kehutanan KPH Barito Tengah.

Tabel 4. Hasil Penilaian Kinerja Penyuluhan Kehutanan KPH Barito Tengah.

No.	Responden	Skor	Skor Interval	Tingkat Kinerja
1.	Betty Right	78,54	>60-80	Bagus
2.	Yusep Roni	77, 44	>60-80	Bagus
Rata-Rata Nilai Penyuluh Kehutanan KPH Barito Tengah		77, 99	>60-80	Bagus

Responden 1 atau penyuluh kehutanan Betty Right mendapatkan nilai 78,54 yang berarti bagus. Sedangkan responden 2 atau penyuluh kehutanan Yusep Roni mendapatkan nilai 77,44 yang berarti bagus. Setelah nilai kedua responden atau penyuluh dirata-ratakan maka nilai keseluruhan kinerja penyuluh kehutanan di KPH Barito Tengah adalah 77, 99 yang berarti bagus. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan nilai SKP (Sasaran Kerja Pegawai) penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah yang mendapatkan nilai dalam kategori baik. Hal ini dibenarkan kepala KPH Barito Tengah Bahruddinsyah S.Hut, M.P dan 4 ketua KTH bahwa memang benar penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga kinerjanya bagus.

Berdasarkan informasi Kepala KPH Barito Tengah, penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah dalam menjalankan kegiatan penyuluhan dilapangan dibantu ole staff seperti bakti rimbawan, dan dalam rangka peningkatan kinerja penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah, pihak KPH selalu mengikutsertakan penyuluh pada kegiatan webinar, workshop, dan berbagai macam pelatihan.

Penelitian yang dilakukan Astri (2021) tentang penilaian penyuluh kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Tanah Laut diperoleh hasil penilaian penyuluh kehutanan di KPH Tanah Laut berdasarkan penilaian , dimana secara keseluruhan mendapat tingkat kinerja bagus dengan nilai 60,45 dari 7 kriteria atau

indikator yaitu perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, administrasi bidang kepegawaian, kondisi pada wilayah kerja/binaan, kegiatan yang dilakukan penyuluh, dampak dari hasil kegiatan penyuluhan, dan kegiatan pengembangan profesi penunjang.

Perbedaan tingkat kinerja penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah dan KPH Tanah Laut dikarenakan lama bekerja di wilayah binaan bekerja, penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah sudah bekerja selama 5 tahun lebih sedangkan semua responden atau penyuluh kehutanan di KPH Tanah Laut telah bertugas di wilayah kerja selama 2-5 tahun (Responden 1 selama 2 tahun sedangkan responden 2 dan responden 3 selama 3 tahun). Masa kerja berpengaruh sekali terhadap kuliatas kerja pengawai, karena dengan adanya masa kerja yang sudah bertahun-tahun pegawai akan lebih banyak akan pengalaman dan keterampilan yang jadi lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sejalan dengan masa kerja yang bertambah diharapkan semakin berkembang dan menguasai pekerjaannya dengan lebih baik serta mampu mengatasi berbagai macam persoalan terkait dengan pekerjaannya. Meningkatkan kemampuan penyuluh dalam melakukan penyuluhan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, kepintaran dapat ditingkatkan dengan belajar, sedangkan keterampilan dapat ditambah dengan mengerjakan sesuatu secara berulang-ulang kali. Jadi walaupun penyuluh kehutanan di KPH Barito Tengah hanya ada 2

orang sedangkan KPH Tanah Laut ada 3 orang, tetapi kinerjanya lebih bagus hal ini disebabkan karena lama bekerja di wilayah kerjanya, hal ini menyebabkan penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah sudah mengenal kondisi wilayah kerjanya bagaimana sehingga sudah terbiasa.

Sejalan dengan penelitian Astri (2021), jumlah penyuluh kehutanan di setiap tingkatan pemerintahan ditetapkan seperti pada instansi daerah, setiap provinsi paling banyak 12 orang penyuluh kehutanan ahli dan pada kabupaten paling sedikit 7 dan paling banyak 38 orang penyuluh kehutanan ahli. Penyuluh terampil paling sedikit 6 dan paling banyak 99 orang. Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, paling banyak 6-18 orang penyuluh kehutanan terampil dan 5-9 orang penyuluh kehutanan ahli. Sedangkan untuk jumlah penyuluh kehutanan ahli di pusat adalah 12-24 orang (Kementerian Kehutanan, 2015).

Hal ini sangat tidak sebanding dengan jumlah penyuluh kehutanan di KPH Barito Tengah yang hanya berjumlah 2 orang, sehingga 1 orang penyuluh mendapat wilayah binaan 3-4 kecamatan dari 7 kecamatan wilayah kerja KPH Barito Tengah. Banyaknya desa dan kelompok tani yang dibina oleh penyuluh kehutanan akan sangat mempengaruhi kinerja mereka khususnya pada kriteria penilaian kondisi wilayah kerja, administrasi kepegawaian, hasil dan dampak kegiatan yang dilakukan penyuluh serta pelaporan pemantauan, kemudian evaluasi. luasnya wilayah kerja dan banyaknya kelompok binaan penyuluh kehutanan yang memiliki kegiatan penyuluhan bersama kelompok tani binaan mengakibatkan tertundanya kegiatan- kegiatan lain seperti pembuatan laporan, RKT Penyuluh, Pembuatan DUPAK, dan perkembangan kelompok tani binaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang penilaian kinerja penyuluh kehutanan di KPH Barito Tengah berdasarkan penilaian dari 7 indikator penilaian penyuluh kehutanan peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016.

Menunjukkan bahwa nilai rata-rata kinerja penyuluh kehutanan di KPH Barito Tengah termasuk dalam kategori bagus dengan skor sebesar 77,99. Responden pertama mendapatkan skor sebesar 78,54 dan responden kedua mendapatkan skor 77,44. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan nilai SKP (Sasaran Kerja Pegawai) penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah yang mendapatkan nilai dalam kategori baik. Hal ini dibenarkan kepala KPH Barito Tengah Bahruddinsyah S.Hut, M.P dan 4 ketua KTH bahwa memang benar penyuluh kehutanan KPH Barito Tengah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga kinerjanya bagus.

Saran

Saran untuk KPH Barito Tengah agar selalu memberikan dukungan penuh kepada penyuluh Kehutanan KPH Barito Tengah agar dapat menjalankan program atau tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, B, N, A. 2021. *Kinerja Penyuluh Kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanah Laut*. [Skripsi]. Banjarbaru: Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat.
- Azami, R. 2018. *Persepsi Penyuluh Kehutanan dan Petani Terhadap Hutan Rakyat di Kabupaten Bogor Jawa Barat*. [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Pandoyo. 2020. *Peran Penyuluhan Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Undang Undang NO. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Undang Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2010 Penyuluhan Kehutanan. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM/2016 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Presiasi Wana Lestari, berita negara republik indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018. Laporan Kinerja (LKj) Pusat Penyuluhan. Pusat Penyuluhan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Kementerian LHK. 2019. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan.

Kementerian LHK. 2020. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2014. Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan. Peraturan menteri kehutanan republik indonesia nomor : P.78/Menhut-II/2014, 2014, 2014 (August), 1-43.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2015. Kriteria Penetapan Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan (WKPK). Jakarta.

Farida I & YE Diarsi. 2017. Dinamika Kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Dan Pedesaan Mangga Delima Taman Nasional Karimun Jawa. *JSEP*. Vol 10 No. 3, November 2017.

Fauzi, H. 2017. Pengetahuan Penyuluh Kehutanan Sebagai Pelaku Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. *Jurnal Hutan Tropis*, 5 (1). 14 – 21.